

## OPTIMALISASI KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM INOVASI LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA KENDARI

Lestari Wulandari<sup>1\*</sup>, Arifin Utha<sup>2</sup>, La Manguntara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo

e-mail: lestarilandari@gmail.com

Kendari, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kemajuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuannya dalam memberikan layanan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Metode pengumpulan data meliputi beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode-metode tersebut dilanjutkan dengan analisis data yang meliputi proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan enam indikator: (1) Implementasi bimbingan konseling saat ini kurang optimal dan kurang efektif. (2) Pemberdayaan Kelompok: Keterlibatan perempuan ditandai dengan distribusi yang tidak merata, dimana ada kemauan umum untuk bergabung namun ada juga yang tetap dipilih tanpa melalui proses yang adil; (3) Pemberdayaan Usaha Kelompok: Tantangan yang timbul dari kendala keuangan dan kurangnya kesadaran pemerintah. (4) Motivasi Perempuan: Respon perempuan terhadap motivasi masih berbeda-beda; (5) Pelatihan Peningkatan Kesadaran dan Keterampilan: Proses pelatihan tidak memiliki struktur yang jelas dan tidak konsisten; (6) Upaya peningkatan talenta perempuan dilakukan melalui perluasan pengembangan dan pengembangan jejaring.

**Kata Kunci:** Kapasitas Pemerintah, Penyediaan Layanan, dan Pemberdayaan Perempuan.

### ABSTRACT

*This study aims to assess local governments' progress in enhancing their ability to deliver services that promote women's empowerment at the Department of Women Empowerment and Child Protection in Kendari City. Data gathering methods encompass several techniques such as observation, interviews, and documentation. These methods are followed by data analysis, which involves collection, reduction, presentation, and conclusion. The research findings suggest six indicators: (1) The implementation of counseling guidance is now suboptimal and less effective. (2) Group Empowerment: Women's engagement is characterized by an unequal distribution, with a general willingness to join but some are still selected without a fair process; (3) Group Business Empowerment: Challenges arising from financial constraints and insufficient government awareness. (4) Women's Motivation: The responses to motivation among women continue to differ; (5) Awareness Enhancement and Skills Training: The training process lacks a clear structure and is inconsistent; (6) Efforts have been made to enhance women's talents through the expansion of networking development and development.*

**Keywords:** Government Capacity, Service Delivery, and Women's Empowerment.

## PENDAHULUAN

Meningkatkan kompetensi pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam organisasi. Dalam bidang organisasi, tujuan ini dicapai dengan melaksanakan inisiatif pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Efektifitas pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama pemerintah daerah. Pembentukan dan kelangsungan keberadaan pemerintah daerah sangat penting bagi berjalannya kehidupan masyarakat. Tanpa adanya badan pemerintahan daerah, masyarakat akan terpuruk dalam kekacauan dan anarki. Tujuan utama pemerintahan daerah adalah untuk mengawasi dan melindungi penduduknya, menjamin keamanan mereka dan menegakkan hukum dan ketertiban.

Tugas mendasar pemerintah daerah dan kerangka administratifnya adalah meningkatkan kemampuan dan dampak masyarakat. Aparat pemerintah daerah secara konsisten bertanggung jawab memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat yang berada di bawah kewenangannya. Persoalan pemberdayaan dan perlunya kebijakan desentralisasi mempunyai keterkaitan yang erat, karena hal ini mencakup pemberian otonomi dan yurisdiksi kepada pemerintah daerah dan memungkinkan badan-badan pemerintah daerah untuk merumuskan program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Perempuan adalah anggota masyarakat yang penting, memiliki kepentingan sosial dan budaya yang setara dengan laki-laki. Namun, perempuan yang memiliki intuisi dan hati nurani belum sepenuhnya mengambil sikap ini. Perempuan biasanya menghadapi prasangka sosial karena posisi mereka yang subordinat, yang biasanya diberikan kepada mereka sebagai peran sosial, seperti mengelola tugas rumah tangga, mengurus anak dan pasangan, atau secara khusus, menyelesaikan kewajiban rumah tangga. Adanya kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan senantiasa mempunyai status subordinat dalam hierarki sosial, sehingga menyebabkan berlanjutnya ketidakadilan sosial terhadap perempuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus mengakui dan menjamin laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Menurut Pasal 27 ayat (1), semua warga negara dianggap setara dalam kedudukan hukum dan pemerintahan. Mereka harus mematuhi hukum dan pemerintah tanpa ada pengecualian. Pada tahun 2000, Indonesia, bersama negara-negara anggota PBB lainnya, secara aktif berkontribusi dalam perumusan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sebagai bagian dari upaya memerangi bias. Salah satu tujuan Tujuan Pembangunan Milenium

(MDGs) adalah untuk memajukan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda yang memprihatinkan, baik dari segi jumlah kekerasan yang terjadi maupun tingkat tindakan sadis yang dilakukan oleh pelakunya, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan. Selain itu, perempuan yang bekerja di daerah rawan kekerasan juga terkena dampaknya.

**Tabel 1**

**Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Kendari Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	Psisikis/KDRT	4	2	5	11
2.	Fisik/KDRT	2	2	3	7
3.	Penelantaran/KDRT	4	4	11	19
4.	Penganiayaan	10	2	6	18
5.	IngkarJanji	5	5	7	17
6.	Digugat Cerai	-	-	1	1
7.	Pengeroyokan	-	-	2	2
8.	Human Trafiking	-	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>77</b>

Sumber : Data Statistik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari (2019-2021)

Kajian data tabel menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari merupakan permasalahan yang kompleks, terutama terjadi di dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menjamin keselamatan perempuan. Sayangnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan belum diakui sebagai kejahatan yang sering dialami perempuan, sehingga menimbulkan konsekuensi yang merugikan baik bagi korban maupun kerangka budaya. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 menguraikan langkah-langkah pemerintah terhadap struktur dan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Topik-topik ini berada di bawah wewenang otoritas regional dan memerlukan pemberian bantuan kepada wilayah terkait.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memprioritaskan secara strategis percepatan penggabungan pandangan gender. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat dan memperkuat sistem penerapan pengarusutamaan gender, dengan tujuan akhir mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan. Peraturan daerah diperlukan untuk mengatur

inisiatif strategis ini dan memperkuat penegakan peraturan perundang-undangan nasional yang sudah ada. Kebijakan pengarusutamaan gender berupaya mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan responsif terhadap tuntutan perempuan dan laki-laki. Kebijakan, layanan, program, undang-undang, dan peraturan publik yang adil dan responsif gender akan menjamin manfaat yang adil bagi semua individu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berfokus pada pemberian gambaran rinci mengenai pokok bahasan. Para peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik yang dilakukan dengan sengaja memilih informan yang memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peneliti (Sugiyono 2008:185). Informan yang ikut serta dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Perempuan dan Anak (Pkepa), Tim Pembina Kesejahteraan Keluarga (Tp-PKK), dan Perempuan Berdaya (5 orang). Keterlibatan mereka sangat penting untuk memperoleh dan mengevaluasi data penelitian. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, mengikuti kerangka teori Sugiyono (2009), dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi adalah proses pengumpulan data empiris dengan cara mengamati secara langsung kondisi fisik, fasilitas, dan perilaku subjek yang diteliti. Kumpulkan data langsung dari subjek penelitian dan simpulkan dari observasi gejala-gejala yang dapat mendukung penyelidikan ini.
- 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan yang ditargetkan kepada individu yang mempunyai informasi yang dapat memberikan informasi berharga untuk penelitian.
- 3) Studi dokumentasi memerlukan pemeriksaan dokumen yang sudah ada sebelumnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan bahan kajian. Studi dokumentasi memerlukan pemeriksaan cermat terhadap buku dan dokumen berorientasi penelitian lainnya.

Para peneliti menggunakan pendekatan analisis data seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014), yang menyoroti sifat analisis data kualitatif yang interaktif dan berkelanjutan di setiap tingkat proses penelitian, hingga tercapai kejenuhan data. Analisis data mencakup beberapa proses utama, yaitu Pengumpulan Data, Data reduction (reduksi data),

Data display (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing atau Verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bimbingan Konseling

Menurut Gibson dan Michell (2011), konseling adalah profesi yang menawarkan bantuan, yang menjadi landasan fungsi dan peran konselor dalam masyarakat. Profesi pendamping adalah pekerjaan di mana praktisi menerima pelatihan profesional untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman berlisensi dalam topik tertentu. Untuk mencapai perencanaan strategis yang efektif, perlu adanya bimbingan dan dukungan kepada perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kemampuan dan potensi mereka. Hal ini pada akhirnya akan membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 9 Januari 2023 dengan Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Perempuan dan Anak (Pkepa), diketahui bahwa banyak perempuan yang mengalami berbagai permasalahan dalam keluarganya, lingkaran sosial, dan hubungan emosional. Para perempuan ini kerap meminta bimbingan dan menyampaikan keluhannya kepada Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Perempuan dan Anak (Pkepa) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu peran Departemen Perlindungan Perempuan adalah memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran, gagasan, atau saran.

Pemberdayaan perempuan menjadi faktor krusial di Kota Kendari karena menjadi wadah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan. Program ini memberikan bantuan khusus kepada perempuan yang kurang terlibat atau menghadapi banyak tantangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, hal ini memfasilitasi penemuan jawaban dan penanaman kesadaran diri di kalangan perempuan. Selain itu, hal ini mendorong kerja sama yang efisien di antara kolektif perempuan dan komunitas yang lebih luas.

Pelaksanaan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari kurang ideal karena adanya ketidakteraturan serta kurang efektif dan efisien. Hal ini juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai kemajuan lebih lanjut.

## **B. Pemberdayaan Kelompok**

Kelompok adalah kumpulan individu yang berkolaborasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu. Ukuran kelompoknya moderat, sehingga semua anggota mempunyai banyak kesempatan untuk berkomunikasi langsung.

Efektivitas pemberdayaan perempuan akan maksimal ketika program kerja yang ada mampu terhubung dengan tujuannya, dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam pengembangan usaha. Tujuan pemberdayaan kelompok adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dengan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan, sehingga memungkinkan mereka mencapai peran yang beragam dalam masyarakat. Menurut informan, saat ini ada kelompok yang diberi kewenangan dan terbukti mampu mengembangkan dan memenuhi kebutuhannya sendiri, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini terkait langsung dengan strategi yang bertujuan mengurangi prevalensi perceraian yang disebabkan oleh keadaan ekonomi dan faktor serupa.

Tp-PKK berfungsi sebagai wadah peningkatan status dan pengaruh perempuan dan keluarga, berpartisipasi aktif dalam melahirkan gagasan dan mengambil tindakan untuk lebih memberdayakan perempuan di Kota Kendari. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan keluarga dan perempuan. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah untuk memotivasi perempuan untuk meningkatkan efisiensi mereka dan memperoleh perasaan berdaya.

Tidak adanya kesetaraan gender dalam partisipasi perempuan dalam program ketenagakerjaan menghambat kemajuan yang diharapkan. Meski ada keinginan untuk ikut, namun sudah ada yang dipilih langsung dari kecamatan. Keberhasilan suatu gerakan pemberdayaan perempuan bergantung pada partisipasi aktif dan pemberdayaan seluruh perempuan.

## **C. Pemberdayaan Kelompok Usaha**

Pemberdayaan kelompok merupakan upaya kerjasama yang mempertemukan individu-individu yang memiliki tujuan bersama untuk menerapkan pendekatan yang telah ditentukan. Ukuran keberhasilan suatu kelompok adalah ketika seluruh anggota kelompok secara kolektif menanggung konsekuensinya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kelompok usaha, penting untuk menciptakan infrastruktur yang sesuai dan menerapkan program penjangkauan yang terfokus untuk mendorong lebih banyak minat dan keahlian di bidang usaha tertentu. Muljana (2001) membahas metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kelompok usaha.

- a) Meningkatkan kemampuan organisasi dengan memfasilitasi kinerja peralatan yang optimal.
- b) Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan manajerial.
- c) Pola pikir manajerial dan kewirausahaan para eksekutif, staf, dan supervisor.
- d) Memperluas dan mendiversifikasi jangkauan program informasi dan konseling, baik internal maupun eksternal, untuk menjangkau khalayak dan komunitas yang lebih luas.
- e) Mempromosikan kerjasama antar perusahaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari telah melaksanakan berbagai inisiatif melalui programnya yang berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kekuasaan dan otonomi perempuan. Tugasnya antara lain memberikan nasihat mengenai administrasi usaha yang efisien dan berkonsentrasi pada kemajuan perusahaan milik perempuan di Kota Kendari.

Sebelumnya, ada upaya-upaya yang telah dilakukan, namun terhambat oleh sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dan ketidakpedulian pemerintah terhadap upaya-upaya sosial. Lebih lanjut, salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Kendari gagal memenuhi harapan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan adalah memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam upaya pembangunan Kota Kendari.

Tingkat keterlibatan perempuan di Kota Kendari dalam mendorong pertumbuhan usaha perempuan relatif rendah, hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan di kalangan perempuan. Hal ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk maju dan meningkatkan produktivitas mereka.

#### **D. Memotivasi Perempuan**

Motivasi adalah hasil dari adanya tujuan atau pencapaian tertentu dalam pikiran, disertai keyakinan bahwa aktivitas seseorang akan membawa hasil yang diinginkan. Motivasi adalah tujuan atau kekuatan pendorong yang mendorong seseorang mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, ini adalah elemen motivasi utama yang mendorong individu untuk mengejar dan mencapai tujuan mereka, baik secara positif maupun negatif.

Perempuan di Kota Kendari memiliki kemampuan alamiah yang dipupuk dan diperkuat oleh lingkungan sekitar sehingga mampu memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya secara efektif. Untuk mencapai tujuan pembangunan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama meningkatkan motivasi individu dalam pengelolaan sumber daya, serta secara



konsisten meningkatkan keterampilan perempuan melalui inisiatif dan kegiatan ketenagakerjaan yang dirancang khusus untuk perempuan. Dengan berpartisipasi dalam konteks kooperatif atau kolektif, perempuan dapat menunjukkan kekuatan mereka, yang mengarah pada pemberdayaan, kemandirian, dan kompetensi mereka.

Dengan memotivasi perempuan dan memfasilitasi pertukaran ide, kita dapat mendorong pengembangan pandangan dan konsep baru. Hal ini pada gilirannya mendorong kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kemandirian perempuan.

Tp-PKK telah berupaya memotivasi perempuan, namun hanya sedikit yang menunjukkan sikap menerima, sementara sebagian besar tidak tanggap. Upaya kami ke depan akan memprioritaskan peningkatan frekuensi kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mereka dan mendorong kecenderungan yang lebih besar terhadap pengembangan keterampilan.

### **E. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan**

Stephen R. Covey (2002) menegaskan bahwa peningkatan kesadaran merupakan proses mendasar yang melibatkan penanaman cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Tujuannya adalah untuk menginspirasi individu untuk melakukan perubahan dengan meningkatkan kesadaran mereka. Peningkatan kapasitas adalah upaya yang bertujuan untuk mendorong perempuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat memberikan dampak yang berarti terhadap pembangunan.

Tujuan pelatihan keterampilan untuk pengembangan profesional adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan kompetensi kerja, sehingga meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman, meningkatkan produktivitas yang efisien, menambah inisiatif pelatihan dan pengembangan yang bermanfaat dan efektif.
- b) Meningkatkan keterampilan sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pelatihan, khususnya menginstruksikan orang agar mahir menggunakan teknologi baru.
- c) Meningkatkan kemampuan mengikuti kemajuan teknologi dan menyelaraskan individu dengan tujuan organisasi dan kebutuhan kerja.

Promosi perspektif perempuan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka, sehingga memberdayakan dan mengembangkan kemampuan mereka. Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran penting dalam menentukan kinerja suatu organisasi karena mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pemberdayaan dan kesuksesan.



Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya bersama untuk menumbuhkan pemahaman.

Pelatihan harus mencakup kegiatan pendidikan yang memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Pemerintah daerah harus memprioritaskan fasilitasi perempuan dalam menjalankan aktivitasnya dan memberikan mereka kesempatan pelatihan. Hal ini akan memungkinkan perempuan menjadi lebih inovatif dan mengambil peran kepemimpinan ke arah yang lebih maju. Kurangnya kesetaraan dan pengorganisasian dalam proses pelatihan bagi masyarakat umum, mengakibatkan perempuan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Sementara itu, manajemen puncak harus menyesuaikan upaya mereka dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan keterampilan dengan kondisi dan lokasi spesifik di mana program kerja dilaksanakan.

#### **F. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan**

Penerapan teori dan indikator pembangunan dalam pembentukan kebijakan sering kali menunjukkan keampuhannya dalam mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Perempuan adalah anggota integral dari komunitas sosial, yang mempunyai hak yang sama dan menjalankan peran yang sama dalam proses pembangunan. Disampaikan Kepala Dinas, ukuran pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keterlibatannya dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, upaya yang sedang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan, memungkinkan mereka untuk secara efektif memanfaatkan seluruh potensi mereka dan memberikan kontribusi yang berharga terhadap pembangunan, setara dengan laki-laki.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari telah banyak menerapkan cara strategis untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Hal ini termasuk menciptakan dan mengembangkan jaringan untuk membantu peningkatan pendapatan dan sebagai solusi efektif untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan

#### **KESIMPULAN**

Perkembangan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dinilai melalui penelitian dan perbincangan. Penilaian ini berfokus pada beberapa indikator utama. Pertama, pendampingan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari kurang optimal karena pelaksanaannya yang sporadis serta kurang efektif dan efisien. Kondisi ini menjadi penghambat bagi kemajuan perempuan. Kedua, terdapat disparitas gender dalam partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program kerja, yang menghambat kemajuan yang diinginkan oleh perempuan itu sendiri. Ketiga, meskipun terdapat pendirian badan usaha, tantangan utama terletak pada kurangnya pendanaan dan pengabaian pemerintah terhadap upaya sosialisasi. Ini menyebabkan inisiatif untuk meningkatkan status perempuan di Kota Kendari tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Keempat, dalam hal memotivasi perempuan, terdapat masalah di mana indikator ini hanya menarik bagi sebagian perempuan, sementara sebagian lainnya tidak menunjukkan respons sama sekali. Kelima, dalam meningkatkan kesadaran dan pembangunan kapasitas, terdapat kesenjangan dan tidak adanya program pelatihan terstruktur yang melibatkan masyarakat luas, sehingga perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Terakhir, Departemen Pemberdayaan Perempuan telah menerapkan berbagai pendekatan strategis untuk meningkatkan keterampilan perempuan di Kota Kendari. Ini termasuk mengembangkan dan memperluas jaringan untuk mendukung peningkatan pendapatan serta mendorong pembangunan daerah, dengan tujuan membekali perempuan dengan keterampilan yang diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi.

## REFERENSI

- Covey, Stephen R. 2002. *The 7 Habits Of Highly Effective Families*. Jakarta. Gramedia.
- Gibson, R L, Mitchell, Marianne H. 2011. *Bimbingan dan Konseling (Edisi Indonesia-Edisi keTujuh)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Marwanti, S. & Astuti, D. 2002. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar. *Jurnal SEPA*, Vol 9 N0 1. September.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muljana. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V*. Jakarta. UI-Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.